

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2022**



**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

***Bismillahirrahmannirrahim,  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.,  
Sampurasun,***

Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Kami sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Purwakarta Alhamdulillah dapat menyelesaikan salah satu kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Kabupaten mengikhtisarkan Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Perjanjian Kinerja tersebut berisi Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah dirumuskan dalam Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dan Dokumen APBD Murni Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan perjanjian kinerja yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan yang selanjutnya pencapaian kinerja tersebut akan dituangkan dalam bentuk Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022.

Akhir kata, semoga itikad dan upaya kita selama ini mendapat ridho dari Allah SWT. *Aamiin Yaa Robbal 'Aalamiin.*

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Purwakarta, 28 Januari 2022





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANNE RATNA MUSTIKA  
Jabatan : BUPATI PURWAKARTA

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Purwakarta, 28 Januari 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KABUPATEN PURWAKARTA

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		
		URAIAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
<b>Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial</b>				
1.1	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69.92
	Sasaran :			
	1.1.1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya , dan Bertaqwa	1. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.04
		2. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.58
		3. Persentase Seni dan Budaya yang Dibina dan Dilestarikan	Persen	95
		4. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	72
		5. Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0.5
	1.1.2 Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	1. Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan	Persen	40
	1.1.3 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	Tahun	70.68
1.2	Tujuan : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1. Angka Kemiskinan	Persen	7.63
		2. Tingkat Pengangguran	Persen	10.08
	Sasaran :			
	1.2.1 Meningkatnya Penanggulangan	1. Angka Kemiskinan	Persen	7.63
	1.2.2 Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	47.75
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	10.08
	1.2.3 Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89.71
		2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	76.47
<b>Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional</b>				
2.1	Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	60

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		
		URAIAN	SATUAN	TARGET
	Sasaran : 2.1.1 Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	55
		2. Nilai SAKIP Kab. Purwakarta	kategori	BB
		3. Nilai LPPD Kab. Purwakarta	Poin	3.5
	2.1.2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Predikat	B
		2. Persentase Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Dikembangkan	Persen	100
2.2	Tujuan : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Perangkat Daerah	2
	Sasaran : 2.2.1 Meningkatkan Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Perangkat Daerah	2
	2.2.2 Meningkatkan Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	1. Indeks Profesionalitas ASN	Poin	Rendah (61-70)
<b>Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan</b>				
3.1	Tujuan : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persen	88.63
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	72.31
	Sasaran : 3.1.1 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persen	88.63
		Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen	85.82
		Cakupan Layanan Persampahan	Persen	61
		Cakupan Layanan Air Limbah	Persen	32

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	SATUAN	TARGET	
		Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	65.52	
	3.1.2 Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	72.31	
		Persentase Rencana Rinci Tata Ruang yang	Persen	11.11	
3.2	Tujuan : Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan	Kontribusi Pariwisata terhadap PAD	Persen	50	
	Sasaran : 3.2.1 Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	1. Jumlah Wisatawan	Orang	2,515,000	
<b>Misi 4 : Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa</b>					
4.1	Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.66	
		2. Indeks Gini	Poin	0.36	
		3. Pengeluaran Perkapita	Rp	13,000,500	
		4. Inflasi	Persen	2.96	
	Sasaran :				
	4.1.1	Meningkatnya Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi	1. Laju UMKM Yang Dibina	Persen	100
			2. Laju Koperasi Aktif	Persen	95
	4.1.2	Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan	1. Laju Pertumbuhan	Persen	70
			2. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	5
	4.1.3	Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif	1. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Trilyun	70
	4.1.4	Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan, dan Peternakan	1. Skor Pola Pangan Harapan	Poin	92
			2. Laju Produksi Pertanian	Persen	1.08
			3. Laju Produksi Peternakan	Persen	2
			4. Laju Produksi	Persen	14
	4.1.5	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Status Indeks Desa Membangun	Status	Berkembang

**PROGRAM DAN ANGGARAN  
TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	496,791,239,966
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	191,768,229,486
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	51,353,500
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	64,120,000
	<b>DINAS KESEHATAN</b>	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	52,879,633,944
6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	117,928,355,085
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	9,819,515,000
8	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	506,876,000
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	171,209,050
	<b>RUMAH SAKIT BAYU ASIH</b>	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	167,933,211,765
11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5,619,449,098
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28,022,965,566
13	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	17,221,243,285
14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4,080,300,000
15	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	30,610,417,144
16	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	268,755,000
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	143,518,560,704
18	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	724,998,000
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2,932,201,800
20	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	13,551,799,000
21	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	685,000,000
22	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6,769,631,050

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
23	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	8,697,569,700
24	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	31,117,283,657
25	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	235,048,650
26	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	10,849,999,550
<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>		
27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,006,038,805
28	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1,158,608,000
29	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2,005,600,000
30	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	410,307,500
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>		
31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,274,995,342
32	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,534,999,700
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>		
33	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,579,748,123
34	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	647,151,941
<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN</b>		
35	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,148,034,188
36	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1,380,607,983
<b>DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		
37	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,275,865,339
38	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	166,675,250
39	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	733,045,800
40	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1,076,310,050
41	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	116,055,950
42	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	200,000,000
43	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	185,845,900
44	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	266,600,948
45	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	204,667,950

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
46	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	57,303,900
47	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	165,766,505
48	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	23,690,700
<b>DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI</b>		
49	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,491,011,284
50	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	550,000,000
51	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	825,000,000
52	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	200,000,000
53	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	125,000,000
<b>DINAS PANGAN DAN PERTANIAN</b>		
54	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,794,983,844
55	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1,144,766,065
56	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	42,989,450
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>		
57	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32,251,823,894
58	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	125,000,000
59	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	475,000,000
60	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	10,000,000
61	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	75,000,000
62	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	315,000,000
63	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	275,000,000
64	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	75,000,000
65	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	25,000,000
66	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2,109,935,163
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAAN SIPIL</b>		
67	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,189,689,577

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
68	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	71,078,050
69	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	65,925,000
70	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	772,945,850
<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>		
71	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,432,913,670
72	PROGRAM PENATAAN DESA	2,499,959,600
73	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	25,000,000
74	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	884,074,150
75	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1,325,000,000
<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
76	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,877,373,282
77	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	349,385,450
78	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	8,610,281,650
79	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	6,425,904,885
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>		
80	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,060,312,818
81	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2,470,311,480
82	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	100,001,200
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
83	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,920,526,563
84	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5,182,113,500
85	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	7,344,950,850
86	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	427,812,100
87	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	461,999,100
<b>DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>		
88	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14,335,553,220
89	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	49,999,550
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	100,000,000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
91	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	404,200,000
92	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	449,991,750
93	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	49,997,900
94	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	54,978,000
95	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	14,999,650
96	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	329,994,250
97	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	100,000,000
98	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	299,999,100
99	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	50,000,000
100	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	440,000,000
101	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	29,998,800
102	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	29,999,300
	<b>DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	
103	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,786,514,725
104	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	99,989,800
105	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	199,950,000
106	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	299,986,500
107	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	393,394,000
108	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	399,999,800
	<b>DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>	
109	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14,029,439,087
110	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1,018,531,400
111	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	11,624,881,150
112	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	972,639,950
113	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,209,995,450
114	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	79,999,300
115	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	199,998,350

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
116	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	210,000,000
117	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	199,999,550
118	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1,140,002,500
119	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	405,019,250
120	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	179,999,550
121	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	275,004,450
	<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>	
122	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2,013,745,000
123	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	49,797,150
124	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,794,755,779
125	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	290,117,787
126	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	97,000,000
	<b>DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN</b>	
127	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,534,496,292
128	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	410,289,166
129	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	896,700,000
130	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	30,000,000
131	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	670,326,950
132	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	502,787,600
133	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	50,000,000
134	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	483,309,200
135	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	40,590,000
	<b>DINAS PANGAN DAN PERTANIAN</b>	
136	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1,120,586,750
137	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4,853,900,000
138	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	149,999,700
139	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	410,700,000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		
140	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65,884,625,609
141	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11,796,622,624
142	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	1,407,860,000
143	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4,381,794,855
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>		
144	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	48,769,578,059
145	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	26,819,398,300
<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>		
146	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,616,624,080
147	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	869,998,350
148	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	949,998,900
149	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	299,999,800
<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>		
150	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49,123,890,805
151	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	338,110,747,808
152	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2,049,325,250
<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>		
153	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25,251,886,074
154	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7,501,318,450
<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		
155	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40,764,360,782
156	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4,501,676,850
157	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2,736,920,000
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>		
158	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25,524,143,103
159	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2,953,600,000
160	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	818,470,000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
	<b>KECAMATAN JATILUHUR</b>	
161	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,370,314,163
162	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5,985,550
163	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19,971,750
164	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21,762,550
165	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3,220,650
	<b>KECAMATAN SUKASARI</b>	
166	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,135,442,571
167	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4,284,450
168	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7,704,750
169	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3,000,000
170	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	76,815,150
171	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	57,079,150
	<b>KECAMATAAN MANIIS</b>	
172	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,974,441,994
173	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	44,880,000
174	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28,640,250
175	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13,320,000
	<b>KECAMATAN TEGALWARU</b>	
176	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,163,337,816
177	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34,107,900
178	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16,808,600
179	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12,810,000
180	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	62,191,000
181	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	48,024,550

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
<b>KECAMATAN PLERED</b>		
182	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,478,666,444
183	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8,497,600
184	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22,808,350
185	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10,415,250
<b>KECAMATAN SUKATANI</b>		
186	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,048,141,505
187	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39,300,290
188	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10,000,000
189	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52,692,960
190	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	21,400,820
<b>KECAMATAN DARANGDAN</b>		
191	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,486,435,289
192	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41,185,000
193	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	157,315,000
194	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29,177,700
<b>KECAMATAN BOJONG</b>		
195	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,540,197,128
196	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19,400,000
197	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18,760,650
<b>KECAMATAN WANAYASA</b>		
198	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,687,944,065
199	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25,691,200
200	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11,900,000
201	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	90,990,000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
	<b>KECAMATAN KIARAPEDES</b>	
202	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,486,525,928
203	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,000,000
204	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24,000,000
	<b>KECAMATAN PASAWAHAN</b>	
205	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,155,070,098
206	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7,947,850
207	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	36,807,000
	<b>KECAMATAN PONDOKSALAM</b>	
208	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,348,115,259
209	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3,780,000
210	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	44,350,600
211	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30,140,700
	<b>KECAMATAN PURWAKARTA</b>	
212	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14,860,387,519
213	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	114,400,000
214	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6,990,714,100
215	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	944,712,000
216	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	53,875,000
217	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16,692,000
	<b>KECAMATAN BABAKANCIKAO</b>	
218	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,272,383,585
219	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8,200,000
220	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16,237,500

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
221	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21,490,200
222	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23,179,850
223	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6,996,400
<b>KECAMATAN CAMPAKA</b>		
224	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,320,267,793
225	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18,890,000
226	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,660,000
227	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7,200,000
228	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	47,250,000
229	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19,332,700
<b>KECAMATAN CIBATU</b>		
230	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,616,592,840
231	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	160,069,070
<b>KECAMATAN BUNGURSARI</b>		
232	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,341,249,818
233	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20,940,200
234	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3,200,000
235	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42,975,000
236	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3,600,000
<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		
237	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,754,742,931
238	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	135,548,800
239	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1,843,196,841

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
239	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1,843,196,841
240	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	185,088,800
241	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	277,026,350
242	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	963,801,200
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>2,423,941,711,281</b>

Purwakarta, 28 Januari 2022  
**BUPATI PURWAKARTA**  
  
**ANNERATNA MUSTIKA**